

**MEMBANGUN TATANAN SISTEM EKONOMI “BEBAS”
KRISIS
(Sebuah Pendekatan Normatif Ideal Perspektif Al-Qur’an)*
Oleh : Hadi Sutjipto****

ABSTRAK

Krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianutnya sistem ekonomi kapitalis yang banyak diadopsi sebagian besar negara dalam perjalannya menunjukkan banyak kelemahan. Di samping dari segi paradigmanya yang rapuh, juga melahirkan kebijakan ekonomi yang rentan.

Kita saat ini menantikan sebuah sistem ekonomi alternatif yang mampu mengeluarkan warga dunia dari krisis global. Mengapa Islam yang selama ini diyakini sebuah ideologi Islam diluar sosialis dan kapitalis tidak dipertentangkan sebagai alternatif untuk menjawab kalangan besar ini ?

Sistem ekonomi Islam memiliki nilai ruhiyah yang memiliki kejelasan tentang konsep pemilihan, pemanfaatan kepemilikan dan pola diskusi kekayaan antara manusia.

* Makalah Juara ke III, LKTI dosen Unisba Tahun Akademik 1999-2000

** Hadi Sutjipto adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Unisba.

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Masalah

"Kapitalisme Global terancam ambruk," demikian kata George Soros beberapa waktu lalu (15/9/98) di depan Komite Pelayanan Perbankan Majelis Rendah di Washington DC. Menurutnya, sejumlah pasar Asia menderita kemunduran lebih parah daripada yang dialami Wall Street tahun 1926. Di Indonesia, sebagian besar kemakmuran yang diterima selama 30 tahun pada era Soeharto lenyap seketika. Sementara Jepang, sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, baru saja dilaporkan merosot 3,3 persen dalam kuartal kedua. Sedangkan Rusia lebih parah lagi. Negara ini mengalami kehancuran finansial total setelah mengalami hiperinflasi. (*Kompas*, 17/9/98).

Soros menyoroti tiga faktor yang berpengaruh terhadap hancurnya sistem kapitalisme global:

- (1) Kekacauan Rusia telah membuka sejumlah kelemahan dalam sistem perbankan internasional. Selain rawannya neraca keuangan, bank-bank juga terlibat dalam *swap*, transaksi *forward*, dan perdagangan derivatif di antara mereka dengan kliennya. Transaksi ini tidak terlihat dalam neraca keuangannya. Sistem canggih itu terguncang ketika sistem perbankan Rusia ambruk. Bank-bank Rusia berkewajiban membayar utang yang sudah jatuh tempo tetapi mereka tersangkut kliennya. Akibatnya, tidak ada jalan untuk memenuhi kewajiban dari satu bank ke bank yang lainnya.
- (2) Sakit di periferi sangat terasa sehingga sejumlah negara mulai berusaha keluar dari sistem kapitalisme global. Pertama-tama Indonesia. Kemudian disusul oleh Rusia yang menderita kehancuran menyeluruh.
- (3) Ketidakmampuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang program-programnya tampak tidak berjalan.

Beberapa waktu lalu, di Inggris, di hadapan Konferensi Partai Buruh, PM Inggris Tony Blair mencuatkan lagi gagasan yang telah lama menjadi perdebatan para ekonom tentang alternatif di luar sosialisme dan kapitalisme: *The Third Way* (Jalan Ketiga). Secara kebetulan pula, pada saat yang sama, sosiolog Anthony Giddens menerbitkan sebuah karyanya yang berjudul, *The Third Way: The Renewal of Social Democracy*. (*Republika*, 18/10/98).

Lalu, apa sebetulnya yang menarik dari "Jalan Ketiga"-nya Giddens yang diyakini sebagai alternatif terbaik untuk saat ini dalam upaya mengeluarkan warga dunia dari krisis global? Benarkah tidak ada alternatif lain, sebagaimana diklaim Giddens, di luar sosialisme dan kapitalisme? Mengapa Islam yang selama ini diyakini sebagai satu-satu ideologi besar di luar sosialisme dan kapitalisme tidak diperhitungkan sebagai alternatif oleh para cendekiawan untuk menjawab tantangan besar ini? Lantas, mampukah Islam menjawab semua ini?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu saja memerlukan jawaban yang pasti dan tuntas.

1.2. Identifikasi masalah

Mengingat begitu dahsyatnya krisis global yang akan atau sedang mulai terjadi wajar jika kemudian banyak pakar, terutama ekonom, merabab-raba dan menelusuri akar krisis untuk kemudian mencari solusinya.

Berkaitan dengan paparan di atas, secara ideal-normatif, tulisan ini bertujuan untuk menjawab :

1. Sejauh mana kelemahan ekonomi kapitalisme dalam mewujudkan kemakmuran manusia ?.
2. Sejauh mana kerusakan kapitalisme berkontribusi terhadap berbagai krisis ekonomi dunia yang terjadi ?.
3. Bagaimana relevansi *The Third Way*-nya Antony Giddens dalam pencarian jalan alternatif, khususnya dalam rangka mengatasi krisis ekonomi dunia?
4. Sejauh mana relevansi dan urgensi ekonomi Islam yang diyakini sebagai "Jalan Tunggal" mampu mengatasi seluruh problem ekonomi yang dihadapi manusia ?.

1.3. Manfaat

Melalui tulisan ini, dapat terwujud hal-hal berikut:

1. Terbukanya wacana baru tentang kajian ekonomi Islam yang selama ini hanya ditampilkan secara parsial dan tidak benar-benar universal.
2. Terbukanya akar krisis yang selama ini terkesan baru sebatas tataran yang sangat artifisial dan tidak benar-benar mengakar.
3. Terbentuknya pemahaman baru tentang kapitalisme sebagai biang krisis ekonomi dunia.

4. Terciptanya kesadaran baru bahwa tanpa ekonomi Islam yang secara global telah digariskan oleh Alquran, berbagai solusi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia adalah suatu hal yang mustahil dan utopis.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tulisan ini seluruhnya dalam tataran ideal-normatif dan sejauh mungkin menghindari hal-hal yang pragmatis yang selama ini telah banyak dibahas oleh para ekonom. Oleh karena itu, tulisan ini akan terasa sangat idealis dan paradigmatis; tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi praktis, tetapi lebih dimaksudkan sebagai sebuah tawaran ide.

BAB II

“JALAN KETIGA”: UPAYA MEMOLES WAJAH KAPITALISME

2.1. “The Thid Way: Gaya Baru, Muka Lama

The Third Way-nya Anthony Giddens boleh jadi merupakan sebuah karya yang mampu membuka mata untuk bisa lebih berani dan jernih menilai fakta-fakta yang terjadi selama ini.

Giddens, sebagaimana terungkap dalam bukunya, menangkap adanya kelemahan pada sistem kapitalisme. Kelemahan kapitalisme, menurutnya, terletak pada keyakinan bahwa orang mampu mengendalikan dunia hanya semata-mata dengan memandang dunia itu sebagai pasar yang sangat luas. Sebelumnya, sosok sosialisme pun tak lepas dari koreksinya. Kebiasaan berpikir bahwa kita mampu mengendalikan sejarah, merupakan sisi lemah sosialisme.

Hanya saja, Giddens tampaknya bersikap “setengah hati”. Terbukti, dengan gagasannya itu, ia seolah tidak ingin melepaskan diri dari mainstream kapitalisme. Sebab, menurutnya, pencarian ideologi alternatif yang benar-benar baru dengan meninggalkan sosialisme dan terutama kapitalisme akan memunculkan persoalan kelewat besar. Oleh karena itu, yang diperlukan saat ini adalah semacam upaya memberi “sinergi baru” bagi kapitalisme. Namun, hal yang paling menarik dari Giddens adalah gagasannya tentang perlunya sebuah “pemerintahan global” yang menjadi komponen kunci, yang nantinya secara niscaya akan mampu menghadapi “musuh” bersama: globalisasi. Masalahnya, “pemerintahan global” yang didambakan Giddens tampaknya tidak terlepas dari pemikiran awal untuk tidak meninggalkan ideologi status quo, yakni kapitalisme. Dengan demikian, gagasan Giddens sebetulnya hanyalah upaya “memoles” wajah

lama kapitalisme agar bisa tampil dengan “gaya baru”. Ini tentu saja tidak akan menyelesaikan masalah, karena sama sekali tidak menyentuh apalagi mengubah faktor fundamental yang menjadi ciri ideologi ini, yakni: liberalisme yang berpijak pada asas manfaat. Padahal, inilah sebetulnya yang menjadi biang segala krisis yang terjadi saat ini.

Dengan itu, kritik atas kapitalisme dan solusi yang ditawarkannya cenderung superfisial; tidak benar-benar menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Untuk itu, keberanian untuk mengkritisi paradigma kapitalisme berikut kebijakan turunannya harus selalu dilakukan, sembari meraba-raba alternatif mana yang terbaik untuk menggantikannya.

2.2. Wajah Buruk Kapitalisme

Secara cermat, kita akan melihat beberapa persoalan mendasar dari kapitalisme, khususnya di bidang ekonomi, yang telah menyebabkan berbagai krisis mutakhir.

Sistem ekonomi kapitalisme, sebagaimana kita ketahui, muncul bersamaan dengan Revolusi Industri. Tak lama setelah munculnya sistem itu, terjadilah berbagai kezaliman yang dilakukan oleh kaum borjuis kapitalis terhadap kaum buruh. Hal tersebut mengakibatkan berbagai penderitaan dari kalangan kaum buruh. Gap antara si kaya dengan si miskin semakin lebar.

Ketimpangan sosial dalam sistem masyarakat kapitalis adalah hal yang wajar. Sebab, dalam pandangan kapitalisme, problem ekonomi terletak pada faktor produksi barang dan jasa, bukan pada masalah distribusinya. Pandangan demikian berangkat dari asumsi awal bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat pemuasnya terbatas. Dari sini, lahirlah kemudian kebijakan untuk selalu meningkatkan kemakmuran suatu negara dengan cara meningkatkan produksinya. Kemakmuran penduduk suatu negara jadinya diukur semata-mata melalui faktor pertumbuhan produksinya. Muncullah kemudian konsep GNP, GDP, dan sebagainya. Meningkatnya GNP berarti meningkatnya kemakmuran suatu negara. Dengan demikian, yang menjadi perhatian ekonomi kapitalis sebetulnya adalah kemakmuran negara, bukan kemakmuran individual.

Untuk itu, sistem ini membiarkan orang-orang bekerja untuk memproduksi barang dan mengusahakannya. Setiap individu diberikan kebebasan untuk memiliki kekayaan semaksimal kemampuannya sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Sistem ini membiarkan distribusi harta berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan sebebas-

bebasnya. Akibatnya, harga menjadi satu-satunya pengendali distribusi. Artinya, siapa saja yang memiliki harga, dia bisa mengambil kekayaan. Sistem ini hanya memberi kesempatan kepada orang yang mampu berpartisipasi dalam produksi barang dan jasa. Dengan produksinya itu, mereka menetapkan harga, dan dengan harga itulah, mereka memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Selain itu, konsep kebebasan pemilikan harta dalam rangka peningkatan GNP telah menyebabkan orang-orang mengambil jalan apa saja dalam rangka memproduksi barang dan memuaskan kebutuhannya. Kaum kapitalis tidak memperhatikan lagi apakah memperoleh kekayaan dengan cara menguasai sektor publik, melakukan konglomerasi, korupsi dan kolusi, menipu dan berlaku curang, menimbun dan mengambil bunga (riba), berjudi, dan sebagainya. Mereka pun tidak mempedulikan jenis-jenis barang produksi yang diperdagangkan, kecuali yang maslahat menurut ukuran akal mereka. Dengan kehidupan seperti itu, terjadilah berbagai dampak negatif dalam hubungan antar sesama manusia yang mengakibatkan jatuhnya manusia kepada martabat hewan dan rusaknya seluruh nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Persoalan tidak adanya batasan-batasan kepemilikan individu secara tegas, menjadi problem lain dalam kapitalisme, sehingga dalam kenyataannya, bisa berakibat mengerikan. Bagaimana mungkin sebuah jalan dimiliki oleh seorang individu? Rasionalakah bila seorang individu (pihak swasta) mempunyai hak kepemilikan atas hutan, bahan tambang, sumber air, bahkan sebuah pulau? Di sisi ini, nyata sekali kerapuhan sistem kapitalisme.

Belum lagi dengan adanya ketidaknormalan aspek usaha dalam sistem kapitalisme. Bagi seseorang yang bermodal uang Rp 100 Juta, misalnya, cukup dengan mendepositokan uangnya tersebut jika bunga per bulannya 30 persen saja, misalnya ia akan mendapatkan jatah Rp 3 Juta perbulan! Bisa dibayangkan rezeki sebesar itu tanpa usaha. Padahal, di sisi lain pengusaha-pengusaha kecil membanting tulang untuk mengembalikan kredit usahanya, bila tidak ingin mati tercekik utang. Inilah konsekuensi logis dari dimunculkannya sektor non-real (moneter) yang berisiko kelewat besar bagi kelangsungan sektor real.

Pertanyaan selanjutnya, apakah mungkin ketamakan dari sistem kapitalis akan mampu dihilangkan agar satu sisi di atas bisa diatasi atau setidaknya ditekan? Ini tampaknya mustahil, karena bagaimanapun liberalisme yang berasaskan manfaat (materi) semata dan sama sekali menafikan aspek spiritual (ruhiah) adalah watak khas yang tidak bisa

dipisahkan dari ideologi ini. Inilah justru yang menjadi cikal bakal dari berbagai krisis yang ditimbulkan oleh kapitalisme.

BAB III MENGURAI BENANG KRISIS

3.1. Kapitalisme Sebagai Penyebab Krisis

Di samping karena dari segi paradigmanya yang rapuh, dalam tataran praksis, kapitalisme global juga telah melahirkan sejumlah "kebijakan" ekonomi (baca: politik ekonomi) yang rentan. Berbagai kebijakan ekonomi yang diberlakukan tentu saja tidak terlepas dari rumusan awal kapitalisme tentang liberalisme (ekonomi) yang ditegakkan di atas dasar manfaat semata. Inilah yang kemudian diujakan oleh Barat, terutama AS ke berbagai negara di dunia. Dari rumusan ini, lahirlah kemudian berbagai kebijakan yang nyaris diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia.

3.1.1. Beberapa Kebijakan Global Ekonomi Kapitalis

(1) **Pembentukan Sistem Perseroan Terbatas.** Sistem ini pada awalnya muncul sebagai upaya melindungi aset para pemilik modal dan pengelola perusahaan dari para kreditor dan pemilik hak lainnya dalam perusahaan, seandainya perusahaan mengalami kegagalan. Namun, dalam perjalanan selanjutnya, karena kegiatan perusahaan acapkali dikontrol oleh segelintir atau bahkan satu-dua pemegang saham (pemilik modal) mayoritas, maka sebagian besar pemegang saham minoritas tidak dapat lagi mengelola perusahaan. Mereka hanya bisa mengelola modal (saham)-nya dengan cara menjual atau membelinya di pasar modal. Akibatnya, mereka tidak lagi menjadi rekanan perusahaan, tetapi hanya sekadar pemegang surat-surat berharga perusahaan yang dapat diperjual-belikan tanpa harus ada izin perusahaan.

Sementara pasar modal pun memungkinkan pemegang saham mayoritas menjual sahamnya kepada perusahaan yang

bersangkutan ataupun membeli saham lebih banyak lagi baik saham perusahaan yang bersangkutan maupun perusahaan lain tanpa harus meminta izin kepada siapa pun dan tanpa harus bertanggung jawab pada kegiatan perusahaan. Motif mereka menjual atau membeli saham di pasar modal tentu saja semata-mata karena ingin mendapatkan laba besar dan cepat. Semua ini lebih jauh mengakibatkan terpisahnya modal (saham, surat berharga, atau sekuritas lainnya) dengan sektor real. Akhirnya, pasar modal pun berubah menjadi sebuah kasino besar, dengan perseroan terbatas sebagai pilar utamanya. Artinya, spekulasi telah mendominasi pasar modal, sementara fluktuasi harga yang sangat ekstrem dan berulang-ulang telah menjadi watak alamiah dari pasar modal ini. Aktivitas ekonomi seperti inilah sebetulnya yang menjadi pemicu utama krisis moneter dan krisis ekonomi di berbagai negara.

- (2) **Kebijakan Pasar Modal.** Kebijakan pendirian pasar-pasar modal di berbagai negara adalah salah satu cara yang cukup menonjol dari politik ekonomi kapitalisme. Kebijakan tersebut diujakan terutama oleh AS kepada para penguasa di berbagai negara. Tujuannya bukanlah untuk melakukan investasi secara real (baca: investasi tak langsung, sebagaimana yang mereka klaim), tetapi agar mereka bisa dengan leluasa berdagang saham di pasar-pasar modal yang ada, sehingga mereka bisa dengan mudah memasukkan ataupun menarik modal ke/dari negara-negara yang bersangkutan kapan saja mereka suka.

Ketika para investor Barat masuk ke pasar modal, jelas mereka tidak akan menunggu harga saham naik secara normal, karena itu akan memakan waktu lama. Dengan modal yang amat besar, sebagaimana yang dimiliki George Soros misalnya, pasar akan dengan mudah direayasa sedemikian rupa dengan cara mempengaruhi harga-harga saham yang ada. Dengan kemampuan pemain lokal yang kecil, tentu saja rekayasa akan dengan sangat mudah dilakukan; entah dengan iming-iming material, trik-trik pasar, maupun berbagai gertakan yang dilakukan lewat media yang notabene dikuasai oleh mereka.

Kadang-kadang, beberapa investor Barat seolah beraksi sebagai suatu grup. Misalnya, untuk mencapai target tertentu, mereka bersama-sama menarik modalnya dari pasar, sehingga kadang-kadang terjadi kemerosotan harga yang merata, yang lebih jauh dapat memukul nilai mata uang negeri setempat, sehingga terancam

bank-bank lokal yang meminjamkan modalnya untuk disertakan di pasar modal.

Yang lebih ekstrem, pasar modal bisa menyedot dana lebih besar daripada dana yang diinvestasikan di sektor real itu. Pada akhir tahun 1995 saja, tak kurang dari 150 triliun rupiah uang yang beredar di lantai bursa di Indonesia (Ma'roef, 1996). Sementara jumlah sebesar itu hanya dimainkan dan dinikmati oleh segelintir orang saja di tengah mayoritas masyarakat yang dengan susah payah meraih laba lewat sektor real. Padahal, seandainya uang sebesar itu diinvestasikan di sektor real, berapa ratus pabrik bisa didirikan, berapa bahan baku bisa diserap, dan berapa ratus ribu tenaga kerja bisa dikerjakan.

- (3) **Sistem Perbankan Ribawi.** Sistem ini sebetulnya menjadi biang bencana dalam sistem kapitalis. Sebab, bank berhak menghimpun dana masyarakat, mengelolanya (seolah-olah miliknya sendiri), dan mendistribusikannya kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan cara mengambil bunga (riba) dengan kadar tertentu. Namun, pada faktanya, distribusi dana tersebut lebih banyak diberikan kepada para investor dan pengusaha termasuk para pemegang saham-besar. Bahkan, yang sering terjadi, kredit itu, dengan bunga rendah tentunya, diprioritaskan bagi pemilik bank sendiri (yang memang mayoritasnya adalah para investor) dan grup perusahaannya sendiri. Setelah itu, baru pengusaha kecil dan masyarakat umum, dengan bunga yang jauh lebih tinggi.

Ringkasnya, sistem perbankan ribawi, sebagaimana pasar modal, secara alamiah akan membuat dana masyarakat hanya berputar di kalangan terbatas..

- (4) **Pemberlakuan Uang Kertas *Inconvertible*.** Kebijakan ini dibuat sesungguhnya untuk menutupi cacat yang ada pada sistem perbankan yang didasarkan pada tipu daya; untuk mencegah keruntuhan bank; dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank. Kebijakan ini ditetapkan pengawasannya di bawah bank sentral. Dengan ini, bank sentral di suatu negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan uang baru yang sebetulnya tidak memiliki nilai intrinsik sama sekali yang akan diedarkan di tengah-tengah masyarakat.

Secara sederhana, penerbitan uang baru oleh bank sentral dengan cara menuliskan nilai pada rekening-rekening negara atau

masyarakat, akan menimbulkan bertambahnya uang yang beredar, yang secara otomatis akan menurunkan nilai uang. Sementara pada saat yang sama, hal itu akan menaikkan harga barang dan jasa secara terus-menerus, yang berarti menimbulkan inflasi. Semua ini tentu saja pada akhirnya harus ditanggung oleh masyarakat luas. (Untuk lebih jelas, lihat: *Hazzat al-Aswaq al-Maliyah, Asbabuha wa Hukm asy-Syar' i fi Hadihi al-Asbab*, Thariqul 'Izzah, Mei, 1998).

3.1.2. Beberapa Kebijakan Ekonomi Kapitalis di Negara Berkembang

Selain keempat kebijakan di atas, watak rakus kolonialis yang melekat pada kapitalisme ini telah mendorong negara-negara maju, khususnya Eropa dan AS, menciptakan kebijakan yang destruktif bagi negara-negara berkembang demi kepentingan mereka. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

- (1) **Pembangunan Ekonomi Lima Tahunan.** Tujuan dari gagasan ini adalah agar negara-negara yang baru saja lepas dari penjajahan dapat segera masuk ke dalam perangkap baru, yakni penjajahan ekonomi. Sebab, untuk mengimplemantasikan gagasan ini, tentu saja dibutuhkan banyak dana. Sementara sebagian besar negara jajahan tentu saja adalah negara miskin. Dari sinilah kemudian muncul kebijakan "bantuan luar negeri" (baca: utang luar negeri) dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Pada kenyataannya, negara-negara yang "dibantu" itu hanya bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi sesaat dan "semu" untuk kemudian terpuruk seketika ketika utang-utang yang ada (berikut bunganya) telah jatuh tempo. Contoh real, utang negara-negara Amerika Latin saat ini tidak kurang dari 300 miliar dolar AS. Brazil, misalnya, memiliki utang pokok sebesar 39 miliar dolar plus bunga 120 miliar dolar. Kalau utang ini dibagi dengan 130 juta penduduk Brazil, berarti setiap individu menanggung utang sebesar 923 dolar. Sementara salah satu wilayah Uni Emirat Arab ada yang berutang sebesar 1 miliar dolar AS. Jika utang ini dibagi dengan 120 jumlah penduduk negara yang bersangkutan, berarti setiap jiwa menanggung utang 4545 dolar AS. (Bandingkan dengan Indonesia yang memiliki utang tidak kurang dari 200 miliar dolar, belum termasuk bunganya, lalu kalikan dengan kurs sekarang). Fakta yang lebih menyakitkan adalah bahwa tidak kurang dari 33 negara di Afrika yang terperangkap utang luar negeri merupakan negara-negara yang pertumbuhan ekonominya paling rendah dengan jumlah orang miskin paling banyak di dunia. Utang negara-negara ini

seluruhnya adalah 127 miliar dolar dan menghabiskan sekitar 76 persen produk nasionalnya setiap tahun.

- (2) **Sistem Perdagangan Bebas.** Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya negara-negara maju untuk mendominasi negara-negara berkembang. Sebab, persaingan yang tercipta akibat liberalisasi perdagangan ini jelas tidak seimbang. Dari sini, lahirlah antara lain kebijakan seperti GATT (General Agreement on Tariff and Trade), pendirian WTO (World Trade Organization), dll dalam rangka menghapuskan hambatan tarif dan membuka pasar-pasar internasional bagi produk-produk negara maju.
- (3) **Swastanisasi.** Kebijakan ini ditempuh dengan cara mengubah sektor publik menjadi sektor swasta dengan dalih untuk efisiensi. Ini tentu saja akan menguntungkan segelintir pemodal besar dengan mengorbankan rakyat banyak. Kebijakan ini sebetulnya diadopsi oleh Barat ke negara-negara berkembang agar mereka dengan leluasa bisa mengikutsertakan para investornya.
- (4) **Pendirian Lembaga-lembaga Moneter Internasional.** Tujuan pendirian lembaga-lembaga keuangan ini adalah dalam upaya mengokohkan dominasi Barat, khususnya AS, atas negara-negara berkembang. Contohnya adalah pendirian IMF (International Monetary Fund). Untuk merealisasikan tujuannya, IMF memberikan "bantuan" dan merekayasa krisis, sehingga negara-negara yang "dibantu" tersebut justru akan selalu bergantung pada kebutuhan akan utang. Dalam kondisi demikian, IMF akan dengan mudah mengajukan sejumlah syarat dengan dalih melakukan reformasi ekonomi kepada negara-negara pengutang, sehingga negara-negara tersebut akan dengan mudah dikendalikan sesuai dengan kepentingan mereka. Fenomena ini telah banyak dialami oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pada faktanya, tidak ada satu negara pun yang "dibantu" oleh IMF, juga lembaga keuangan internasional lainnya, yang bisa bangkit dari kemerosotan ekonominya. Yang terjadi, negara-negara tersebut justru semakin terpuruk dan semakin sulit untuk bangkit. (Lebih jauh, lihat: Majalah *Al-Wa'ie*, edisi 128).

Itulah antara lain beberapa "kebijakan" ekonomi yang dilancarkan oleh kapitalisme Barat di berbagai negara. Kebijakan ekonomi ini tentu saja mesti dipahami sebagai sebuah "imperialisme" gaya baru yang menjadi watak ideologi yang rakus ini. Karena itu, kebijakan ekonomi yang dilancarkan negara-negara kapitalis Barat yang dipelopori AS tentu saja tidak terlepas dari berbagai kepentingan politik mereka, meskipun melihat dampaknya yang mengglobal seolah menjadi bumerang bagi mereka sendiri.

3.2. Islam Sebagai “Jalan Tunggal”

Dengan melihat berbagai fakta di atas, kini kita sebetulnya tengah menantikan sebuah sistem ekonomi alternatif yang seperti diharapkan banyak pihak mampu mendorong pertumbuhan dan sekaligus pemerataan. Suatu sistem yang berpihak pada setiap pelaku ekonomi, bahkan kepada semua orang. Suatu sistem yang memberikan kesempatan seluas-luasnya pada mekanisme pasar dengan tetap memberikan peran kepada pemerintah, kekuatan sosial, dan hukum untuk melakukan intervensi demi menjamin agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat banyak; juga suatu sistem yang menjamin kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil pengusaha, di samping mampu melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat banyak, serta memberikan kesejahteraan lahir dan batin secara hakiki.

Sistem yang dimaksud adalah sistem ekonomi Islam. Sebuah sistem yang memiliki nilai ruhiyah, karena ketika dilaksanakan dalam kehidupan secara inheren, di dalamnya terkandung ketundukan seorang Muslim terhadap Allah swt. Sistem ini memiliki kejelasan tentang konsep pemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan pola distribusi kekayaan di antara manusia.

Secara empirik, sistem ekonomi Islam melalui institusi Daulah Khilafah sebagai pelaksanaannya terbukti telah mampu mengayomi umat Islam berabad-abad lamanya. Bagaimana ketika masa pemerintahan ‘Umar ibn ‘Abdul Aziz salah seorang Khalifah dari Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mencari para *mustahiq* (yang berhak menerima) zakat karena kemakmuran yang demikian merata di tengah-tengah masyarakat. Itu semua membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan secara benar oleh para khalifah di masa lalu telah membawa umat manusia kepada kemakmuran dan kesejahteraan.

Sementara secara konseptual pun tanpa harus bersikap apologetik sistem Islam akan mampu menjadi “Jalan Tunggal” atau satu-satunya jalan yang bisa menjawab berbagai tantangan di masa depan. Sebab, sistem Islam adalah sistem yang dibuat oleh Allah swt. yang tentu saja Mahatahu atas segala sesuatu yang terbaik buat manusia daripada manusia itu sendiri.

Untuk itulah, dalam konteks pembicaraan kita saat ini, kita mesti kembali menelaah sistem ekonomi Islam sebagai satu-satunya alternatif, yang selama ini cenderung dipandang sebelah mata oleh para pemikir Islam.

3.3. Paradigma Ekonomi Islam

Ada perbedaan mendasar antara Islam dan kapitalisme dalam memandang problem ekonomi. Jika kapitalisme memandang bahwa problem ekonomi terletak pada produksi (dengan asumsi kebutuhan tidak terbatas sedangkan alat pemuasnya terbatas), maka Islam memandang bahwa problem ekonomi yang paling utama justru adalah masalah distribusi. Dari pandangan mendasar inilah kapitalisme lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataannya, sementara Islam justru menekankan sebaliknya. Orientasi dari sistem ekonomi Islam adalah dalam rangka mewujudkan kemakmuran manusia secara individual, bukan hanya kemakmuran masyarakat atau negara secara umum; sehingga yang dipentingkan Islam bukan hanya pertumbuhan, tetapi yang lebih penting adalah pemerataan ekonomi. Dari paradigma awal seperti inilah Islam kemudian melahirkan sejumlah aturan-aturan ekonomi. Demikianlah sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Samih Athif az-Zayn bukunya *Al-Islam Khuthuth al-'Aridhah: Al-Iqtishad wa al-Hukm wa al-Ijtima'* (hlm. 85).

Di bawah ini adalah beberapa pandangan Islam yang paling mendasar tentang ekonomi.

3.3.1. Kepemilikan

Islam memandang bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah (QS 24: 33). Manusia hanyalah diberi oleh Allah dengan kadar yang telah ditentukannya (QS 57: 7). Oleh karenanya, harta semestinya hanya boleh dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Pandangan Islam terhadap harta berbeda dengan sistem kapitalisme yang tidak mengatur kuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) memperoleh harta serta pemanfaatannya maupun sosialisme yang mengatur jumlah (kuantitas) tetapi tidak ditentukan cara (kualitas) harta yang diperoleh. Islam mengatur "cara memperoleh" bukan mengatur masalah jumlah kepemilikan serta mengatur cara pemanfaatan dan pendistribusiannya.

Dalam konteks di atas, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani (1953) dalam bukunya, *Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, membagi kepemilikan ke dalam tiga jenis.

Pertama, kepemilikan individu yaitu izin syariat (Allah dan Rasul-Nya) kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu. Ada lima sebab kepemilikan individu yang diperbolehkan yaitu: (1) bekerja (menghidupkan

tanah mati, berburu, mencari bahan tambang, menjadi makelar dll); (2) warisan; (3) keperluan harta untuk mempertahankan hidup; (4) pemberian negara; dan (5) harta yang diperoleh individu tanpa usaha (seperti: hibah, hadiah, wasiat, barang temuan dan lain-lain). Sementara itu, Islam melarang perolehan harta melalui cara yang tidak diridhai oleh Allah seperti: riba, mencuri, melacurkan diri, dll; usaha-usaha memperoleh harta melalui jalan korupsi, menipu, suap, dll.

Kedua, kepemilikan umum yaitu izin dari syariat kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api (listrik, bahan bakar, gas, dll), padang rumput (hasil hutan dan lain-lainnya); barang yang memang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, danau, jalan, lautan, udara, mesjid, dan sebagainya; dan barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti emas, perak, minyak, dan sebagainya. Pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga murah, sehingga rakyat dapat memperoleh kebutuhan pokoknya (sembako) dengan murah atau gratis yang berakibat akan terpenuhinya kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Ketiga, kepemilikan negara yaitu izin dari syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan pemimpin kaum Muslim (Khalifah). Misalnya, harta ghanimah (rampasan perang), fa'i, khumus, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz, ushr, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dll. Kepemilikan negara atas harta tersebut digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai pemerintahan, keperluan dakwah dan jihad, serta kewajiban-kewajiban lainnya.

Sementara dari segi pemanfaatan harta, Islam mengaturnya sebagai berikut.

Pertama, pengembangan harta akan sangat berkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta, yakni produksi pertanian, perdagangan, industri, dan investasi uang pada sektor jasa di mana hukum pengembangan harta ini terikat dengan masalah cara dan sarana yang menghasilkan harta tadi. Dalam hukum masalah pertanian, misalnya, tidak boleh seseorang menelantarkan tanah lebih dari tiga tahun; dan tidak boleh pula menyewakan tanah. Dalam perdagangan, Islam mengatur bentuk-bentuk syirkah dan jual-beli. Dalam industri, Islam mengatur cara memproduksi barang dan manajemennya. Demikian pula

dalam masalah jasa, Islam mengatur akad perjanjian yang sah dan peraturan pengupahan yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan Sunnah.

Kedua, berkaitan dengan penggunaan harta yaitu pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat material yang diperoleh, Islam mendorong umatnya untuk menggunakan hartanya bukan hanya sebatas kepentingan pribadi dengan manfaat nyata yang dapat dirasakan, namun juga untuk kepentingan orang lain atau kepentingan ibadah. Syariat mengenai zakat, nafkah isteri dan anak, memberi hadiah, hibah, sedekah kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan (terlilit utang, perlu pengobatan, atau terkena musibah) merupakan aturan Islam yang dapat direalisasikan dalam kehidupan.

Di sisi lain, Islam juga mengharamkan penggunaan harta yang dilarang oleh syariat seperti risywah (suap), ishrاف dan tabdzir (membeli barang atau jasa yang haram), serta mencela keras sikap bakhil. Pelarangan pemanfaatan harta pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu bagi dibukanya kegiatan-kegiatan itu. Individu dan masyarakat akan terhindar dari kerusakan.

3.3.2. Distribusi Kekayaan

Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bersama, yakni: (a) Mewajibkan para muzakki (orang yang wajib berzakat) membayar zakat kepada para mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), khususnya kalangan fakir miskin. Yang menolak untuk mengeluarkan zakat akan dikenai sanksi tegas, bahkan bisa diperangi, sebagaimana pada masa Khalifah Abu Bakar. Ketentuan jenis barang-barang yang terkena kewajiban zakat pertanian, perdagangan dan jenis-jenis zakat lainnya, serta jumlah persentasenya telah dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. (b) Memberikan hak kepada setiap warga negara, Muslim maupun non-Muslim, untuk memanfaatkan pemilikan umum. Di sini, negara hanya berhak mengolah dan mendistribusikannya kepada rakyat secara cuma-cuma atau dengan harga murah. (c) Membagikan harta negara seperti tanah, barang, dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan. (d) Memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dengan ketentuan yang sudah baku yaitu satu bagian untuk ahli waris wanita dan dua bagian untuk ahli waris laki-laki sebagaimana yang terdapat dalam Alquran. (e) Melarang upaya menimbun emas dan perak meskipun dikeluarkan zakatnya.

Selain itu, Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan

meraih kemajuan material. Islam menghargai setiap Muslim yang bekerja sebagai bernilai ibadah. Rasulullah saw. memuji orang yang bekerja keras untuk memperoleh nafkah. Suatu ketika Rasulullah saw. mencium tangan sahabat Sa'ad ibn Mu'adz yang amat kasar lantaran habis bekerja keras seraya berkata, "Kedua tangan ini dicintai oleh Allah."

Islam membolehkan dan tidak melarang umatnya menjadi kaya, bahkan terdapat sekian kewajiban agama yang memerlukan kemampuan finansial. Dalam sejarah para sahabat pun, kita mengenal kedermawanan seorang 'Abdurrahman ibn 'Awf yang demikian kaya (ketika wafat, ia meninggalkan harta tidak kurang dari 50.000 dinar).

Sementara bagi lapisan masyarakat yang memang benar-benar miskin atau tidak memiliki kemampuan, negara harus memberikan miliknya berupa tanah atau barang dan uang untuk modal usaha, di samping menjadi kewajiban para karib-kerabat dan tetangganya untuk menolong dengan memberikan zakat atau infak. Dengan cara ini, mereka yang tidak terikutkan dalam mobilitas ekonomi "tertolong" secara sengaja. Harapannya, setelah ini mereka dapat mengikuti derap kemajuan ekonomi masyarakat, bukan menjadi lapisan yang kian terpinggirkan.

Hal lain yang perlu disebutkan adalah mengenai penggunaan sistem mata uang berdasarkan emas dan perak. Dengan mata uang ini, nilai intrinsik (nilai bahan uang tersebut) selalu sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tertera dalam uang). Dengan demikian, mata uang Islam tidak bergantung pada mata uang mana pun. Ia akan mengukur dengan dirinya, tidak dengan yang lain. Dengan demikian, inflasi yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan mendorong lajunya proses pemiskinan, sebagaimana yang sering secara alamiah terjadi dalam kapitalisme tidak akan pernah terjadi.

3.4. Peran Negara

Dari semua uraian di atas, nyatalah bahwa peran negara (Daulah Khilafah) dalam Islam sangatlah vital dalam menerapkan aturan-aturan ekonomi Islam. Negara berfungsi sangat sentral karena ia bertugas untuk mengatur urusan umat. Negara tidak berfungsi minimal (*minimalist state*) sebagaimana dalam sistem kapitalisme pasar bebas, atau mendominasi perekonomian seperti sistem sosialisme; tidak terjerumus terlalu jauh mengatur sehingga jatuh kepada model merkantilisme yang mencampuri urusan ekonomi sampai memberikan monopoli, proteksi, hak istimewa kepada pengusaha tertentu dan sebagainya; tidak juga terlalu lemah dalam menghadapi penyimpangan para pelaku ekonomi.

Peran seperti ini hanya mungkin dapat dilakukan bila pemerintah

digerakkan oleh para birokrat yang memiliki kepribadian mulia dan bersih, yang bekerja demi kepentingan kesejahteraan rakyat dan menjunjung tinggi syariat Allah SWT. Dengan itulah, insya Allah kita akan menuju suatu kehidupan ekonomi yang “bebas” krisis. Lantas, kapankah hal itu terealisasikan? Bergantung pada kaum Muslim sendiri. Sebab, Allah sendiri telah berfirman: *Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mngubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.* (QS 13: 11).

BAB IV PENUTUP

Dari paparan di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kapitalisme mengandung banyak kelemahan yang sebagian besarnya disebabkan oleh paradigmanya yang rapuh, tidak rasional, dan tidak manusiawi.
- b. Krisis ekonomi yang setiap waktu bisa mengemuka ternyata lebih disebabkan oleh ekonomi kapitalis sebagai penyebabnya.
- c. *The Third Way*-nya Anthoni Giddens tidaklah akan menyelesaikan problem ekonomi selama tetap terkukung dalam paradigma kapitalisme
- d. Secara ideal-normatif, sistem ekonomi Islam merupakan “Jalan Tunggal” dan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan setiap problem ekonomi. Perlu terusnya digulirkan wacana ekonomi Islam di tingkat para pemilik kebijakan sebagai solusi paling rasional dalam mengatasi setiap problem atau krisis ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Qodim Zallum, 1996, Slogan-Slogan Serangan Amerika terhadap Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Bangil.
2. Abdul Qodim Zallum, 1998, Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Bangil.
3. Giddens, Anthony, 1999, Merentas Kembali Jalan Ketiga, Gramedia, Jakarta.
4. Grossman, Greoge, 1987, Sistem-Sistem Ekonomi, Bumi Aksara, Jakarta.
5. Hizbut Tahrir, 1997, Piagam Umat Islam, Pustaka Thariqul Izzah,

- Bangil.
6. Muchsin Sulaeman, 1985, Mengatasi Krisis Ekonomi Dengan Islam, PT Al Ma`arif, Bandung.
 7. Muhammad Ismail, 1998, Bunga Rampai Pemikiran Islam, Gema Insani Press, Jakarta.
 8. Sadono Sukirno, 1985, Ekonomi Pembangunan, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
 9. Sadono Sukirno, 1996, Pengantar Teori Makro Ekonomi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
 10. Sritua Arief, 1998, Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia, Zaman Wacana Mulia, Bandung
 11. Taqyuddin An-Nabhani, 1993, Peraturan Hidup Dalam Islam, Pustaka Thariqul Izzah, Bangil.
 12. Taqyuddin An-Nabhani, 1996, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Risalah Gusti, Surabaya.
 13. Tulus Tambunan, 1998, Krisis Ekonomi Masa Depan Reformasi, Penerbit FE UI, Jakarta
 14. Departemen Agama, 1995, Al Qur`an dan Terjemahannya
 15. Kompas, 17 Sepember 1998.
 16. Republika, Minggu, 18 Oktober 1998 , halaman 5.
 17. Majalah Al Wa`ie, 1998, edisi 128, Beirut.